

Overview I-Account APBN

Pendapatan

Rp10,7 T (744,8%)
▼ -32,6% (yoy)

Belanja

Rp32,8 T (79,7%)
▼ -0,8% (yoy)

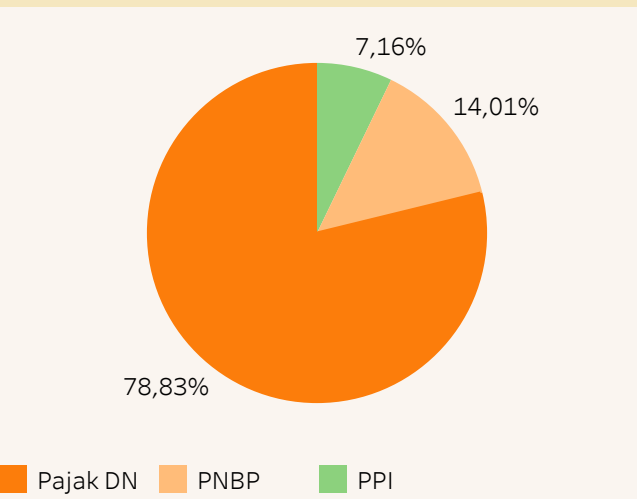
Defisit

Rp-22,2 T (55,8%)
▲ 28,4% (yoy)

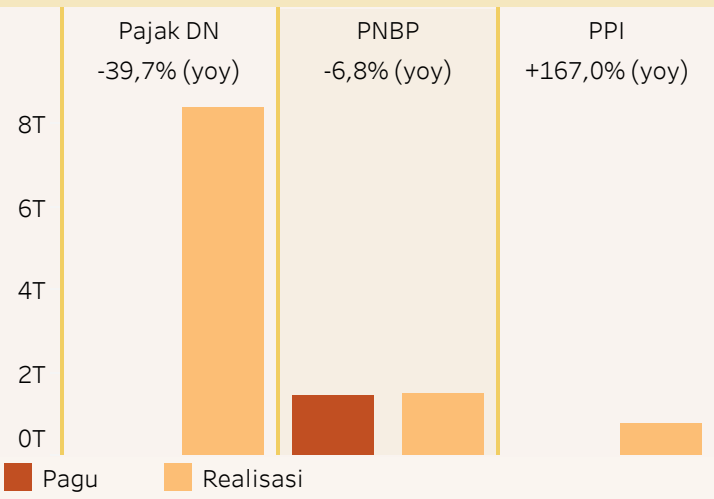
Peta Realisasi Belanja Negara per Wilayah



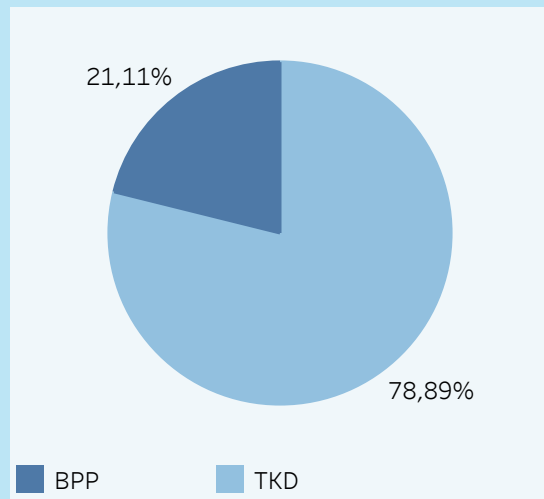
Persentase Komposisi Pendapatan



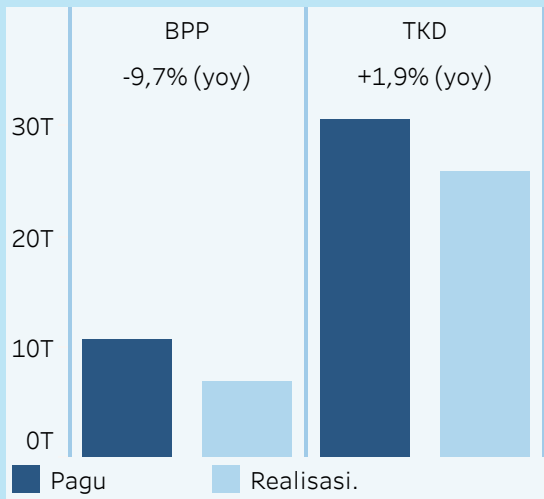
Realisasi per Jenis Pendapatan



Persentase Komposisi Belanja



Realisasi per Jenis Belanja



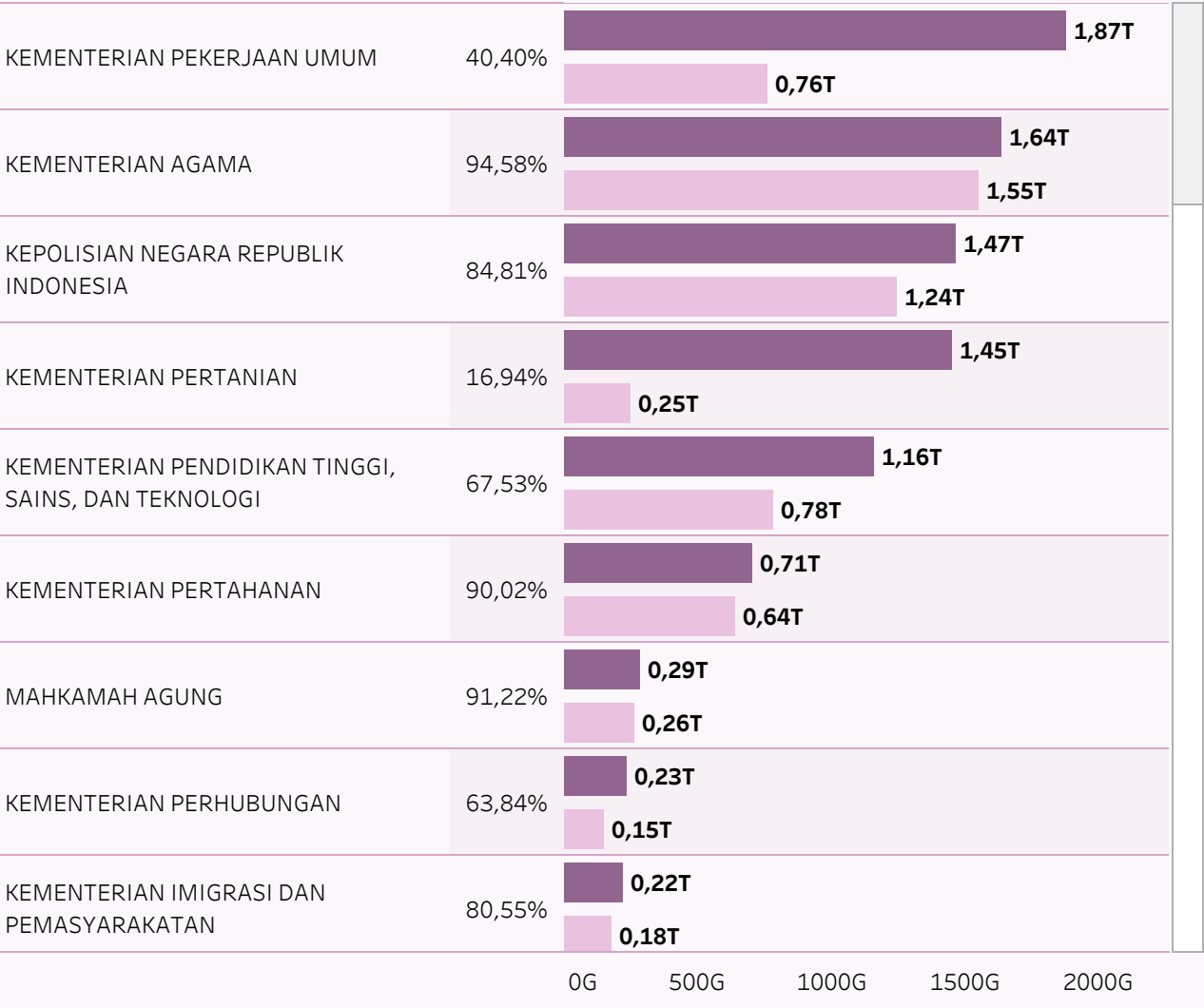
Pendapatan Regional

	Realisasi Y-1	Realisasi	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	15,8T	10,7 T	▼ 32,59%
Grand Total	15,8T	10,7 T	▼ 32,59%

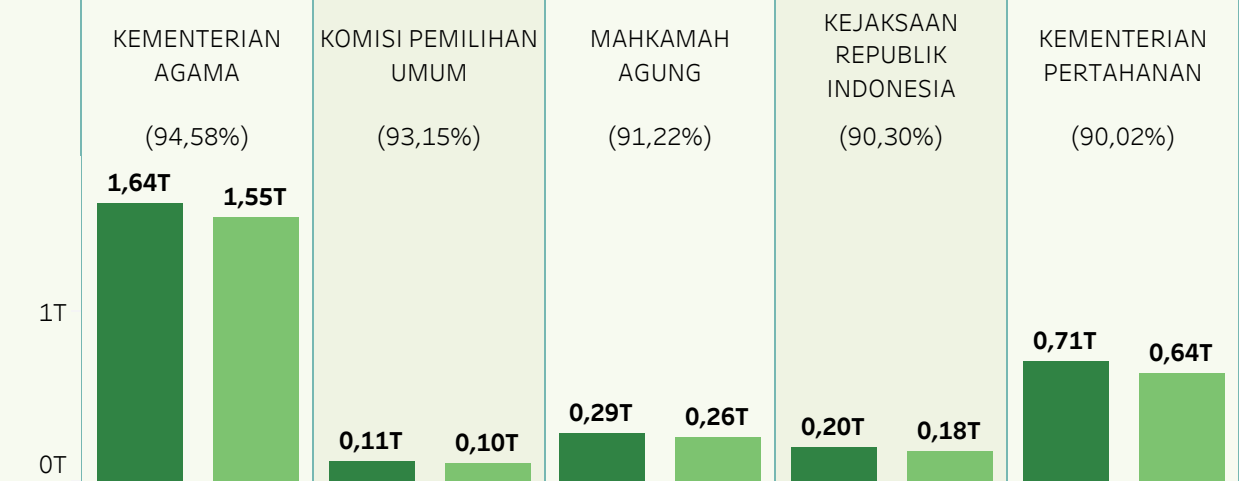
Belanja Regional

	Pagu Y-1	Realisasi Y-1	% thdp Pagu Y-1	Pagu	Realisasi	% thdp Pagu	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	41,7T	33,1T	79,4%	41,2T	32,8 T	79,7%	▼ 0,77%
Grand Total	41,7T	33,1T	79,4%	41,2T	32,8 T	79,7%	▼ 0,77%

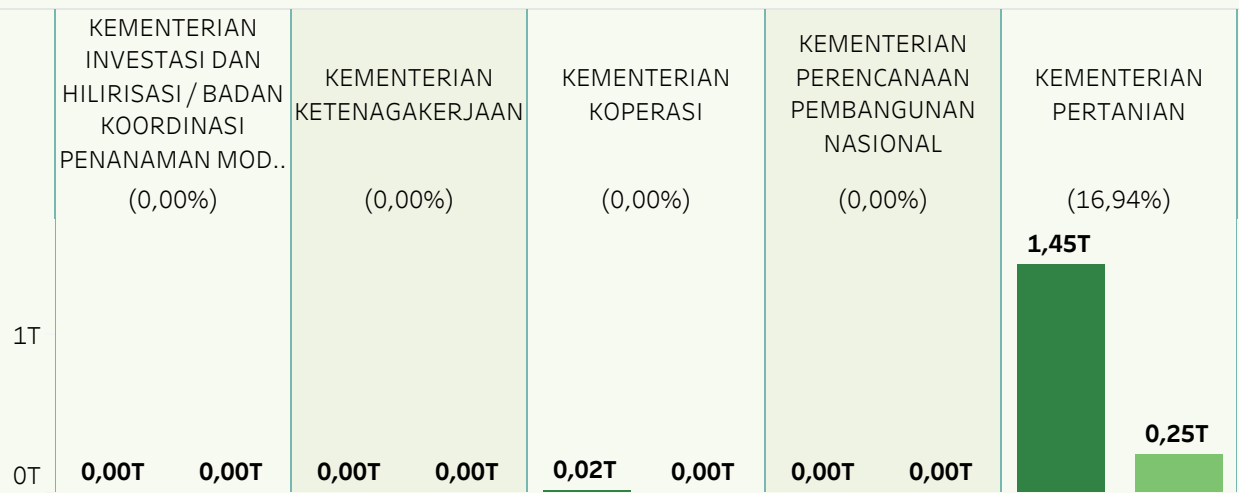
Kinerja 10 KL Pagu Tertinggi



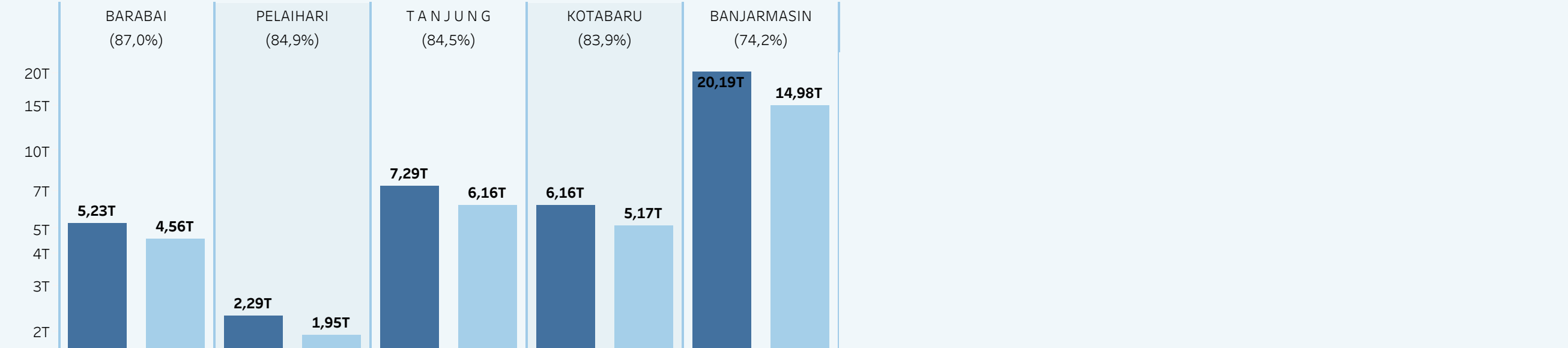
5 KL Persentase Realisasi Tertinggi



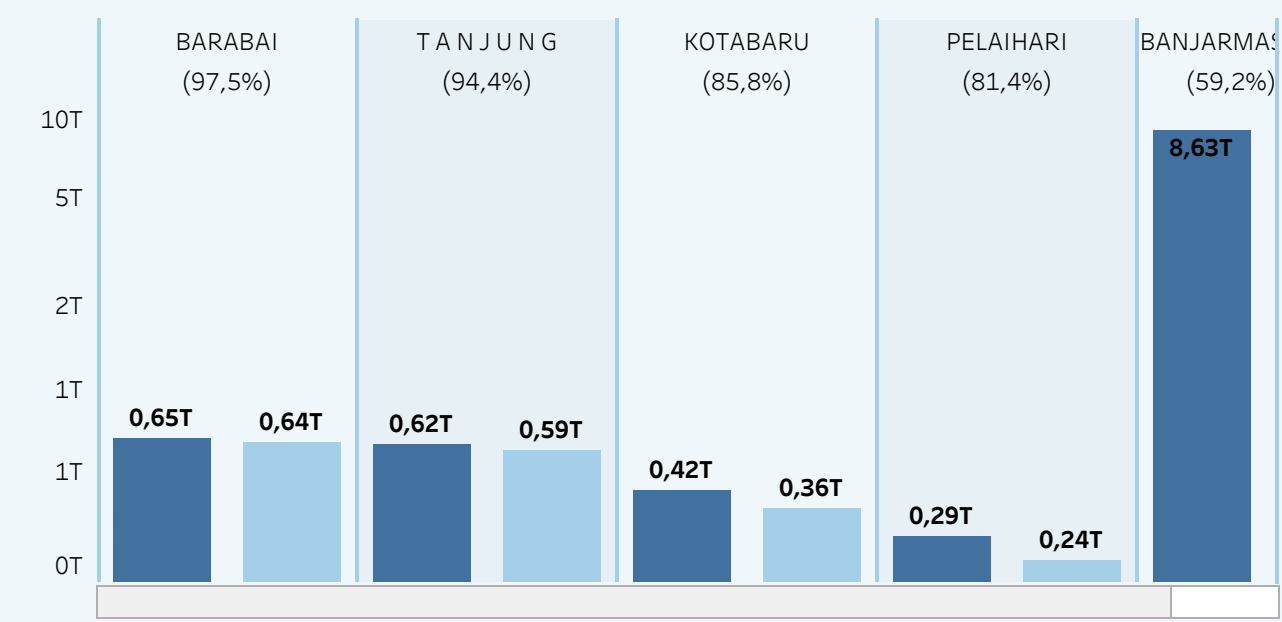
5 KL Persentase Realisasi Terendah



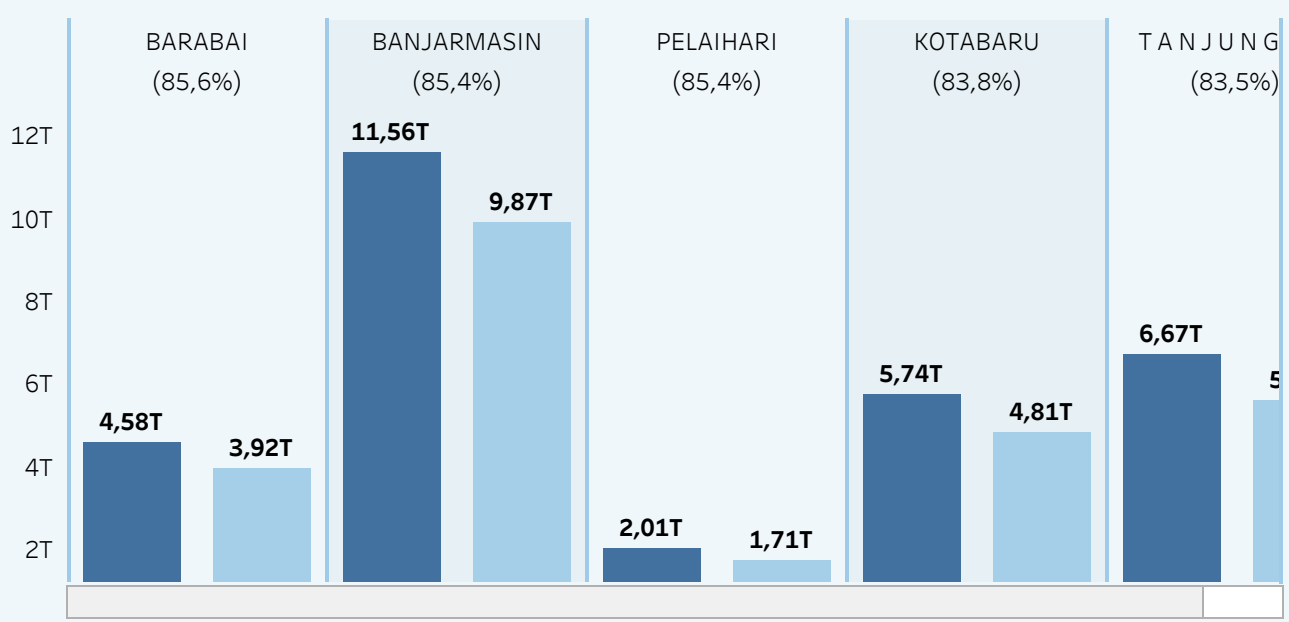
Kinerja Belanja KPPN



Kinerja BPP per KPPN



Kinerja TKD per KPPN



HASIL ANALISIS ISU FISKAL REGIONAL

Analisis Fiskal Regional

A | Perkembangan Pendapatan Negara s.d 7 November 2025

Kinerja Pendapatan Negara sebesar Rp10,7 triliun (48,37%) dari target pendapatan negara sebesar Rp22,04 triliun, terkontraksi 32,59% yoy. Realisasi Pajak Dalam Negeri mencapai 41,27% (Rp 8,40 triliun), Pajak Perdagangan Internasional mencapai 293,73% (Rp763,02 miliar), serta PNBPN mencapai 105,40% (Rp1,49 triliun). Pendapatan negara didominasi oleh Pajak Dalam Negeri (78,83%).

B | Perkembangan Belanja Negara s.d 7 November 2025

1. **Kinerja Belanja Negara sebesar Rp32,8 triliun (79,7%) dari pagu Rp41,2 triliun, terkontraksi 0,77% yoy.** Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai 65,3% (Rp6,93 triliun) dari pagu Rp10,62 triliun, terkontraksi 9,7% yoy dan Transfer ke Daerah mencapai 84,7% (Rp25,88 triliun) dari pagu Rp30,55 triliun, tumbuh 1,9% yoy. Belanja Negara didominasi oleh Transfer ke Daerah (78,89%).
2. **Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Tertinggi,** Kementerian Pekerjaan Umum merupakan K/L dengan pagu tertinggi yaitu Rp1,87 triliun, dengan realisasi mencapai 40,40% (Rp0,76 triliun). Kementerian Agama menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja tertinggi yaitu 94,58% (Rp1,55 triliun) dari pagu Rp1,64 triliun. Sementara, Kementerian Pertanian menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja terendah dengan realisasi baru 16,94% (Rp0,25 triliun) dari pagu Rp1,45 triliun.
3. **Kinerja Belanja 5 K/L Tertinggi dan Terendah,** kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh Kementerian Agama dengan realisasi 94,58% (Rp1,55 triliun) dari pagu Rp1,64 triliun. Sementara, kinerja penyerapan terendah dialami oleh Kementerian Pertanian dengan realisasi 16,94% (Rp0,25 triliun) dari pagu Rp1,45 triliun. Dan untuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koperasi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM realisasinya masih 0%.
4. **Kinerja KPPN,** Kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh KPPN Barabai dengan realisasi sebesar 87,0% (Rp4,56 triliun) dari pagu Rp5,23 triliun. Sementara, kinerja penyerapan terendah berada di KPPN Banjarmasin dengan realisasi 74,2% (Rp14,98 triliun) dari pagu Rp20,10 triliun.

Isu dan Rekomendasi Fiskal Regional

A | Isu Pendapatan Negara, meliputi:

Beberapa satker mengalami kesulitan untuk mencapai target PNBPN karena adanya penetapan kenaikan target yang cukup tinggi oleh Kementerian/Lembaga.

B | Rekomendasi Pendapatan Negara, diperlukan:

Agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap dasar penetapan target dengan mempertimbangkan

potensi riil, kondisi ekonomi daerah, serta tren capaian tahun-tahun sebelumnya.

Kementerian/Lembaga perlu membuka ruang dialog dengan satker untuk melakukan penyesuaian target yang lebih realistis dan proporsional, sekaligus memberikan pendampingan dan strategi peningkatan kinerja.

C | Isu Belanja Negara, meliputi:

Masih terdapat satker kewenangan DK/TP dengan pagu anggaran terblokir 100% lingkup Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 12 satker, dan total nilai pagu sebesar Rp5,9 M, serta rata-rata nilai IKPA sd Triwulan III TA sebesar 72,99. Kondisi ini menyebabkan kinerja capaian IKPA secara agregat menjadi menurun terutama pada Indikator Deviasi Halaman III dan Indikator Penyerapan Anggaran.

D | Rekomendasi Belanja Negara, diperlukan:

Direktorat Pelaksanaan Anggaran selaku pengampu kebijakan implementasi IKPA dapat mereviu dan mempertimbangkan kembali perhitungan kinerja capaian IKPA bagi satker khususnya terhadap satker yang mengalami blokir pagu anggaran sebesar 100% dimana satker yaang bersangkutan tidak dapat merencanakan dan merealisasikan anggaran sama sekali.

HASIL ANALISIS TEMATIK REGIONAL

Analisis Tematik Regional

A | FLPP, Terdapat peningkatan unit yang dibangun periode sebelumnya 9.492 menjadi 9.690 unit, Peningkatan realisasi FLPP periode sebelumnya 8.777 unit menjadi 9.043 unit, peningkatan jumlah lokasi periode sebelumnya 644 lokasi menjadi 649, jumlah Kab./Kota yang ada program FLPP 13 Kab./Kota, dan nominal FLPP mengalami kenaikan periode sebelumnya sebesar Rp1.146.112.250.615,- menjadi 1.181.010.120.365,-.

B | Giant Sea Wall, di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas Giant Sea Wall.

C | Koperasi Desa Merah Putih, Progres realisasi anggaran masih belum terdapat realisasi dari alokasi pagu/perkiraan alokasi dana sebesar Rp6.039 M.

Progres Fase I

Jumlah desa dan kelurahan yang sudah membentuk Koperasi Merah Putih dan jumlah koperasi desa dan kelurahan yang sudah berbadan hukum adalah sudah maksimal seperti periode berikutnya yaitu sebanyak 2.013.

Progres Fase II

2. Jumlah koperasi yang sudah memiliki akun simkopdes (microsite) sebanyak 2.003 terdapat penyesuaian data pada website merahputih.kop.id
3. Jumlah koperasi yang sudah memiliki gerai (minimal 1 gerai) mengalami kenaikan periode sebelumnya 373 menjadi 446.
4. Jumlah keseluruhan gerai koperasi yang sudah aktif semula 438 menjadi 516.
5. Jumlah koperasi melakukan permohonan proposal bisnis semula 77 menjadi 100.
6. Jumlah permohonan proposal bisnis semula 262 menjadi 322.

D | Sekolah Rakyat, Realisasi Jumlah Sekolah Rakyat yang sudah berjalan tetap seperti periode sebelumnya sebanyak 3 SR. Saat ini, target jumlah sekolah rakyat sebanyak 3 SR.

E | SMA Unggul Garuda, belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Telah dilakukan peresmian SMA Garuda Transformasi pada SMAN Banua, oleh Menteri Ekonomi Kreatif pada tanggal 8 Oktober 2025. Peresmian SMA Garuda di Kalsel ini merupakan bagian dari peluncuran serentak di 16 Sekolah Se-Indonesia yang terdiri dari 4 sekolah baru dan 12 sekolah transformasi.

F | Revitalisasi Sekolah, belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. pelaksanaan revitalisasi untuk Jumlah target sekolah yang direvitalisasi adalah 61 Sekolah yang terdiri dari 43 madrasah dan 18 sekolah di daerah transmigrasi

Progres target 43 madrasah adalah 38 madrasah dalam tahap pembangunan, dan 5 masih dalam tahap lelang pekerjaan.

Untuk progres revitalisasi 18 sekolah seluruhnya telah memasuki tahap pembangunan.

G | Ketahanan Pangan, terdapat kenaikan realisasi anggaran untuk mendukung program ketahanan pangan semula Rp548,21M (29,5%) menjadi Rp552,73 M (29,74%) dari pagu sebesar Rp1,86 T.

H | Ketahanan Energi, belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah Kab. HST sedang mengusulkan untuk pembangunan Bendungan Pancur Hanau senilai Rp30 miliar. Bendungan ini merupakan infrastruktur vital yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air baku, irigasi, dan pengendali banjir, tetapi juga berperan penting dalam penyediaan energi.

Isu dan Rekomendasi Tematik Regional

A | Isu FLPP, meliputi:

Ketimpangan Realisasi FLPP Antar Kabupaten/kota menunjukkan distribusi program belum merata.

B | Rekomendasi FLPP, diperlukan:

Pengembangan FLPP antar kabupaten/kota agar tetap menyesuaikan dengan jumlah kebutuhan.

C | Isu Giant Sea Wall, meliputi:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas Giant Sea Wall.

D | Rekomendasi Giant Sea Wall, diperlukan:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas Giant Sea Wall.

E | Isu Koperasi Desa Merah Putih, meliputi:

Alokasi anggaran pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan untuk kegiatan fasilitasi dan pembinaan KDMP baru terbit DIPAny pada bulan Oktober 2025.

F | Rekomendasi Koperasi Desa Merah Putih, diperlukan:

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan agar melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dengan menyusun jadwal kerja yang lebih efisien dan penyesuaian prioritas kegiatan.

G | Isu Sekolah Rakyat, meliputi:

Progres pelaksanaan Sekolah Rakyat belum seragam antar daerah, di mana sebagian wilayah masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat, sedangkan di sebagian wilayah lainnya diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Selain itu, pemanfaatan lahan yang telah disiapkan belum optimal karena pembangunan fisik belum dimulai. Di sisi lain, kebutuhan akan layanan pendidikan bagi masyarakat rentan masih cukup tinggi.

H | Rekomendasi Sekolah Rakyat, diperlukan:

Perlu dilakukan percepatan tindak lanjut dari pemerintah pusat disertai dengan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait. Pemerintah daerah segera mengoptimalkan pemanfaatan lahan melalui percepatan pembangunan fisik serta penyusunan rencana aksi yang terukur. Selain itu, perlu dilakukan pemetaan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat rentan agar intervensi yang diberikan lebih tepat sasaran.

I | Isu SMA Unggul Garuda meliputi:

Diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan benar-benar memanfaatkan kesempatan baik ini untuk melahirkan generasi muda unggul yang '*Go Internasional*' dan kembali ke daerah untuk membangun Kalimantan Selatan.

J | Rekomendasi SMA Unggul Garuda, diperlukan:

Perlu disiapkan program beasiswa, pertukaran pelajar, dan pelatihan internasional bagi peserta didik berprestasi agar mampu mengembangkan wawasan global dan kompetensi internasional. Pemerintah juga perlu memastikan adanya mekanisme pembinaan dan reintegrasi bagi lulusan Sekolah Garuda agar potensi dan pengetahuan yang mereka peroleh di luar daerah maupun luar negeri dapat dikontribusikan kembali untuk kemajuan Kalimantan Selatan.

K | Isu Revitalisasi Sekolah, meliputi:

Pelaksanaan revitalisasi sekolah secara umum telah berjalan dengan baik, sebagian telah dilakukan penyaluran tahap 2.

L | Rekomendasi Revitalisasi Sekolah, diperlukan:

Agar proses pelaksanaan terus dipantau secara berkala untuk memastikan kualitas hasil pembangunan sesuai standar yang ditetapkan. Selain itu, percepatan penyaluran tahap berikutnya perlu dilakukan bagi sekolah yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan capaian fisik, sehingga penyelesaian revitalisasi dapat tepat waktu dan segera memberikan manfaat.

M | Isu Ketahanan Pangan meliputi:

Alih fungsi lahan pertanian menyebabkan pengurangan luas lahan tanam yang produktif sehingga menjadi tantangan utama dalam program ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan.

N | Rekomendasi Ketahanan Pangan, diperlukan:

Perlu memperkuat pengendalian dan penegakan regulasi terkait pemanfaatan lahan pertanian berkelanjutan. Selain itu, diperlukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian melalui optimalisasi lahan tidur, peningkatan produktivitas dengan teknologi pertanian modern, serta pemberian insentif bagi petani agar mempertahankan fungsi lahan pertanian.

O | Isu Ketahanan Energi, meliputi:

Belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Terdapat 2 pembangkit bio energi berjenis biomassa dengan jaringan *off grid* (tidak terhubung langsung dengan jaringan umum) di Kabupaten Tabalong dengan total kapasitas 2,6 MW, yaitu: Pembangkit pertama dikelola oleh PT. Cakung Permata Nusa I (ATA) di desa Kasiau dengan kapasitas 1,1 MW; dan Pembangkit kedua dikelola oleh PT. Astra Agro Lestari di desa Hayub dengan kapasitas 1,6 MW.

P | Rekomendasi Ketahanan Energi, diperlukan:

Pemerintah daerah perlu memfasilitasi integrasi lokal, misalnya melalui penyediaan jaringan distribusi mini-grid atau skema off-taker lokal, agar listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan masyarakat dan industri di sekitar lokasi.

HASIL ANALISIS MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Analisis MBG

Kinerja Program MBG (s.d. 7 November 2025) Belum ada perubahan data pada aplikasi Sintesa dimana jumlah SPPG sebanyak 138, jumlah supplier 96, dan penerima manfaat 398.947 penerima.

Isu dan Rekomendasi MBG

A | Isu MBG, meliputi:

Harga telur dan daging ayam (menu utama MBG) mengalami peningkatan.

B | Rekomendasi MBG, diperlukan:

Perlunya bantuan dan partisipasi dari pemda dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan baku MBG.